

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberadaan etnis minoritas—terutama—Tionghoa di Indonesia memang sudah ada sejak dahulu. Namun, perlakuan negara terhadap etnis tersebut menunjukkan sedikit perbedaan dibandingkan dengan perlakuan negara terhadap etnis mayoritas. Padahal, kedudukan mereka sama di mata hukum. Karena memang mereka sudah menjadi warga negara Indonesia (WNI). Perlakuan yang berbeda ini bahkan sudah dialami oleh etnis minoritas ini sejak jaman Hindia-Belanda, kemudian berlanjut hingga Orde Lama, dan Orde Baru. Pada Orde Lama misalnya, pemerintah cenderung memperbolehkan etnis Tionghoa aktif dalam kegiatan di bidang ekonomi sembari mengawasi dan membatasi pergerakan dan eksistensi mereka dalam bidang birokrat dan politik. Beberapa tokoh pemerintah merupakan warga Tionghoa, diantaranya Dr. Lie Kiat Teng atau Mohammad Ali yang pernah menduduki jabatan sebagai menteri kesehatan, Oei Tjoe Tat yang pernah juga menduduki jabatan menteri pada kabinet yang dikenal dengan Rezim 100 Menteri, selain itu ada juga Mr. Tan Po Goan, salah satu tokoh dari Partai Sosialis Indonesia (PSI) yang merupakan anggota parlemen yang gencar melakukan kritik terhadap pemerintah (Suhandinata, 2009: 324). Namun, peristiwa Madiun 1948 sedikit banyak membawa perasaan traumatis, khususnya bagi kalangan angkatan bersenjata pada saat itu. Hal ini dikarenakan sikap yang diambil oleh duta besar *People's Republic of China* (PRC) pertama untuk Indonesia, yakni Wang Renshu

yang merupakan seorang *huaqiao* menggiring organisasi Tionghoa lokal agar turut serta dalam pengaruh PRC. Perbuatan tersebut berujung pada konflik horizontal antara masyarakat *huaqiao* yang pro-PRC dan masyarakat *huaqiao* pro-Taiwan. Konflik ini acap kali berujung pada kekerasan yang kemudian mengganggu stabilitas keamanan. Konflik antara Jakarta dan Beijing ini berakhir setelah Wang ditarik kembali dari kantor duta besar di Jakarta. Secara tidak langsung, konflik ini membawa pengaruh bagi pemerintah Orde Baru mengenai sentimen “Isu Tionghoa” (Suhandinata, 2009: 325). Peristiwa lain yang semakin memanasi Isu Tionghoa adalah peristiwa 30 September 1965. Akibat peristiwa ini, kecurigaan dan perasaan tidak suka terhadap warga Tionghoa semakin meningkat. Pandangan stereotip dan generalisasi terhadap warga Tionghoa yang awalnya dianggap sebagai warga yang hanya mencari keuntungan dan licik, bertambah dengan anggapan komunis dan tidak patriotik.

Perlakuan yang diskriminatif juga diterima warga Tionghoa pada masa rezim Orde Baru. Pemerintah pada masa itu cenderung menginginkan keseragaman dalam mengatasi isu Tionghoa. Pemerintah kemudian meluncurkan program asimilasi Indonesia (Suhandinata, 2009: 326). Leo Suyadinata dalam (Suhandinata, 2009) menjelaskan program tersebut sebagai sebuah inkorporasi, yaitu digunakan untuk melakukan penindasan terhadap etnis Tionghoa sebagai kelompok minoritas yang dipaksa untuk tunduk dengan identitas kelompok mayoritas (pribumi). Program tersebut diterapkan dengan cara menghilangkan tiga pilar pendukung dan identitas komunitas Tionghoa yakni; sekolah Tionghoa, media Tionghoa, dan bahasa Mandarin. Dalam jurnal yang ditulis oleh Oh Husien, inkorporasi ini pada awalnya

dimaksudkan sebagai sebuah peleburan yang diharapkan masih memiliki cita rasa asli Tionghoa, namun pada kenyataannya yang terjadi adalah peleburan total dimana pemerintah memaksakan kehendaknya untuk menghilangkan seluruh entitas yang berkaitan dengan Tionghoa. Asimilasi ini dimodifikasi oleh pemerintah pada masa Orde Baru melalui paksaan pindah agama, pemaksaan ganti nama, bahkan pernikahan antar etnis (Oh, 2015: 5639-5640). Pemerintah pada masa itu juga melakukan pelarangan bagi warga Tionghoa untuk mengekspresikan identitas dan budaya mereka. Warga Tionghoa dilarang menjalankan agama Kong Hu Cu dan mempertunjukkan huruf kanji secara terbuka. Pemerintah juga membentuk Badan Koordinasi Masalah Tionghoa yang memiliki tujuan untuk mengawasi dan membatasi gerak gerak warga Tionghoa. Secara teoritis, program asimilasi yang digagas oleh pemerintah dinilai berhasil dengan survei yang dilakukan pada tahun 1990 bahwa 94% anggota masyarakat Tionghoa mengakui Indonesia sebagai tanah air mereka (Suhandinata, 2009: 327). Namun, pada kenyataannya pada masa Orde Baru masih banyak terdapat gerakan sosial yang ditujukan kepada warga Tionghoa. Peristiwa 13 Mei 1998 menjadi titik tergelap dalam perihal hubungan antara warga pribumi dan nonpribumi pasca kemerdekaan. Dalam peristiwa tersebut terjadi penjarahan, pembakaran, pemerkosaan, ancaman pembunuhan, bahkan pembunuhan kesemuanta diarahkan kepada warga Tionghoa.

Terdapat beberapa bentuk peraturan yang dikeluarkan pemerintah pada jaman Orde Baru yang mengatur mengenai kehidupan masyarakat Tionghoa dalam bermasyarakat dan bernegara, diantaranya yakni:

1. Instruksi Presiden No. 14 tahun 1967, yang mengatur mengenai agama, kepercayaan, dan adat istiadat masyarakat Tionghoa. Inpres ini dikeluarkan dengan pertimbangan bahwa agama, kepercayaan, dan adat istiadat Tionghoa dapat menciptakan efek psikologis, mental, serta moril yang dianggap kurang sesuai untuk masyarakat Indonesia pada waktu itu. Sehingga akan dianggap menghambat proses asimilasi atau inkorporasi itu sendiri yang merupakan kebijakan pada masa Orde Baru (Instruksi Presiden No. 14 Tahun 1967). Namun, presiden Abdurrahman Wahid kemudian mencabut inpres tersebut dengan ditetapkannya Keputusan Presiden No. 6 Tahun 2000 (Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) No. 6 Tahun 2000 Tentang Pencabutan Instruksi Presiden No. 14 Tahun 1967 Tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina, 2000).
2. Surat Edaran No.06/Preskab/6/67, yang memaksa warga Tionghoa untuk mengganti namanya menjadi nama yang “berbau” Indonesia. Pada 2014, surat edaran tersebut dicabut dengan keputusan presiden No. 12 tahun 2014 (Keputusan Presiden No. 12 Tentang Pencabutan Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor: SE-06/Pres.Kab/6/67, 2014).
3. Keppres No.52 tahun 1977, yang mengatur mengenai pendaftaran penduduk.

Pasca Orde Baru runtuh, pemerintah mulai bertekad untuk menegakkan hukum dan melindungi hak asasi manusia, dengan menghapus peraturan diskriminatif terhadap etnis Tionghoa. Sekarang ini, masyarakat Tionghoa bebas mengekspresikan identitas dan budayanya di hadapan publik. Bahkan penggunaan

bahasa mandarin dapat sering ditemukan di kota-kota besar di Indonesia. Jabatan birokrat dan politik juga sudah mulai banyak diisi oleh etnis Tionghoa. Kebijakan baru ini memperlihatkan bahwa pemerintah reformasi telah secara nyata menggantikan praktik inkorporasi dengan konsep multikultural. Hal ini berarti bahwa seluruh kelompok etnis tetap bekerja sama untuk menciptakan tatanan masyarakat yang baru tanpa meninggalkan identitas asli mereka.

Pilkada serentak yang dilaksanakan oleh KPU pada 2017 lalu menjadi titik balik bagaimana seseorang yang berasal dari golongan minoritas dapat menjadi pemenang, khususnya di Kabupaten Banjarnegara. Pilkada Banjarnegara diikuti oleh tiga pasangan calon yang salah satunya adalah Budhi Sarwono. Budhi Sarwono merupakan seorang mualaf keturunan Tionghoa. Ia dan pasangannya, Syamsudin menang dalam perhelatan pesta demokrasi tersebut dengan mengantongi 285.117 suara mengalahkan dua paslon (Aziz, 2017, dari merdeka.com). Pasangan ini diusung oleh partai politik yang cukup memiliki “nama besar” di Banjarnegara, yakni Partai Golkar, PPP, dan Partai Demokrat. Koalisi pendukung ini memiliki modal berupa 15 anggota DPRD Banjarnegara. Latar belakang dari Budhi Sarwono yang merupakan seorang minoritas, rupanya tidak mempengaruhi bagaimana pola pemilih di kabupaten Banjarnegara. Sedangkan dalam teori, perbedaan antarbudaya yang tidak diikuti dengan kesadaran dan toleransi dari manusia terhadap berbagai budaya yang ada, cenderung menimbulkan respon yang negatif, seperti kedengkian. (Samovar, Porter, & McDaniel, 2010: 20). Selain itu, Dr. A. Dahana (dalam Suhandinata, 2009: 328) berpendapat bahwa tindakan rasial, yakni perilaku tidak suka atau benci terhadap

kelompok ras atau etnis tertentu pada hakekatnya selalu ada dalam diri setiap manusia. Hal tersebut dapat dianggap sebagai bom waktu, yang dapat meledak setiap waktu. Ditambah dengan kenyataan bahwa saat ini Indonesia mengalami masalah yang berkaitan dengan fanatisme agama dan politik, nasionalisme yang bersifat sempit, etnosentrisme yang dapat berujung pada disintegrasikan bangsa Indonesia.

Salah satu contoh kasus bagaimana etnis Tionghoa berhasil dalam medan politik yang cukup menyita perhatian masyarakat adalah bagaimana seorang Ahok dapat menduduki jabatan politis yang cukup strategis. Beliau menduduki jabatan politis pertamanya saat tahun 2004 terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur, kemudian pada 2005 terpilih menjadi Bupati Belitung Timur. Tahun 2007 Ahok mencalonkan diri menjadi Gubernur Bangka Belitung, namun ternyata tidak terpilih. Karir politiknya berlanjut hingga berhasil menduduki Senayan pada 2009 di Komisi-II, dan puncaknya adalah saat ia –dan Jokowi— berhasil memenangkan pilkada DKI Jakarta pada 2012 lalu (Yuanita, 2017). Kejadian-kejadian tersebut yang melatarbelakangi peneliti untuk melakukan penelitian bagaimana kemudian seorang tokoh Tionghoa memenangkan sebuah kontestasi pilkada. Ditambah dengan pilkada yang dilakukan serentak pada 2017 lalu bersamaan dengan DKI Jakarta. Seperti yang sudah diketahui bahwa isu sentimen ras dan agama di DKI Jakarta cukup menarik perhatian masyarakat. Ahok yang saat itu menjadi salah satu calon gubernur mendapat perlakuan diskriminatif yang mengarah pada simbol-simbol dan identitas pribadinya.

Namun, kemenangan Budhi Sarwono dalam pilkada 2017 silam menjadi angin segar bagi minoritas. Kemenangan ini dapat dilihat sebagai sebuah praktik sosial

dimana kandidat pilkada berhasil menerapkan strategi politik yang tepat. Teori praktik sosial menjelaskan bagaimana habitus, modal, serta ranah dapat mengakibatkan sebuah pertarungan secara simbolik (Karnanta, 2013: 13). Sudah menjadi rahasia umum bahwa perhelatan sekelas pemilihan kepala daerah memerlukan modal yang harus diperhitungkan dengan baik. Modal tersebut terdiri dari modal sosial, modal ekonomi, modal simbolik, serta modal budaya. Masing-masing modal memiliki manfaat yang berbeda. Namun, secara garis besar kesemuanya mempengaruhi kemenangan kandidat kepala daerah pada pilkada. Hanafi dalam tulisannya menjelaskan bahwa kebutuhan akan adanya modal bahkan sudah mulai terlihat sejak proses pencalonan atau rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik (Hanafi, 2014: 2). Proses rekrutmen yang cenderung elitis juga membuat sebagian besar pihak menjadi berkecil hati untuk diloloskan oleh partai politik sebagai kandidat kepala daerah. Elitis disini berarti bahwa proses rekrutmen kepala daerah didominasi oleh elit internal partai itu sendiri. Di dalam prosesnya, sosok yang dicalonkan oleh pengurus partai di tingkat daerah bahkan harus mendapat persetujuan dari pengurus partai di tingkat pusat (Hanafi, 2014: 2)

Dalam beberapa kasus, beberapa partai politik bahkan meminta uang mahar dari calon kandidat dengan dalih agar mendapat dukungan dari partai tersebut. Dilansir dari *Geotimes* (Butar-Butar, 2018) beberapa kasus mahar politik yang cukup menggepalkan masyarakat diantaranya adalah:

1. Kasus mahar politik La Nyalla Mattalitti yang mengatakan bahwa ia dimintai mahar politik sebesar 40 Milliar oleh Ketua Umum partai Gerindra (Prabowo Subianto);

2. Kasus mahar politik Dedi Mulyadi yang dilakuka oleh oknum partai Golkar dibawah kepemimpinan SetNov pada pilkada serentak 2018 lalu;
3. Kasus mahar politik Brigjen (pol) Siswandi yang membuat pengakuan bahwa ia dimintai sejumlah uang agar PKS dapat lolos menjadi calon kepala daerah Cirebon;
4. Rumor mahar politik yang diminta oleh PAN dan PKS kepada Sandiaga Uno dalam Pemilihan Presiden 2019 lalu.

Selain mahar politik, calon kandidat yang akan dipilih oleh partai politik juga harus memiliki dukungan dari akar rumput yang kuat. Baik dukungan dari relasi atau jaringan, dukungan dari tokoh agama dan tokoh masyarakat sekitar, serta dukungan dari masyarakat secara umum. Sehingga fungsi modal sosial, modal simbolik, serta modal budaya tidak dapat dikesampingkan. Baik modal fisik maupun non fisik harus dikuasai secara maksimal agar dapat sejalan dengan pemanfaatannya.

Selain itu, penerapan strategi politik yang dirumuskan berdasarkan kesepakatan bersama juga menjadi kunci kemenangan pasangan nomor urut 3 ini. Strategi yang diterapkan untuk melawan kandidat lain disusun dengan memperhatikan data yang ada di lapangan. Sehingga, pada saat penyampaiannya mudah diterima oleh masyarakat karena dianggap sesuai dengan kehidupan mereka. Strategi politik yang dipilih oleh pasangan Budhi Sarwono dan Syamsudin mendapatkan respon yang positif dari masyarakat di Banjarnegara. Budhi Sarwono—khususnya—belajar dari pengalamannya pada pilkada 2011 silam yang menurutnya pada saat itu kurang bisa menerapkan strategi politik yang tepat sehingga berujung pada kekalahan. Dengan

penerapan strategi politik yang disesuaikan dengan kondisi sosial politik Banjarnegara, pasangan BisSa berhasil memenangkan pilkada 2017 lalu. Penyusunan strategi politik pasangan BisSa disesuaikan dengan habitus, modal, serta ranah dalam konteks pilkada. Masing-masing entitas diteliti agar dapat diterapkan dalam strategi politik yang tepat. Sehingga baik habitus, modal, serta ranah memiliki fungsi masing-masing dalam proses kemenangan pasangan nomor urut 3 ini.

Keberhasilan beberapa individu yang berasal dari kaum minoritas dalam memenangkan kontes pilkada menjadi fenomena unik dan cukup menarik di tengah oase masyarakat yang mengelu-elukan pemimpin yang sesuai dengan mayoritas. Sehingga peneliti kemudian tertarik dalam meneliti fenomena tersebut bagaimana strategi politik yang diterapkan oleh kandidat dalam proses kemenangan yang dilihat sebagai sebuah praktik sosial. Hal tersebut dikarenakan, kemenangan dalam kontes pilkada tidak berjalan serta-merta tanpa dibarengi dengan pemanfaatan unsur-unsur yang terkandung dalam sebuah rumus praktik sosial. Baik modal, habitus, maupun ranah masing-masing memiliki manfaat yang dapat digunakan secara maksimal dalam sebuah proses pilkada. Modalitas dalam kontes pilkada tidak hanya bersal dari diri sendiri seorang calon kepala daerah dan/atau pemimpin, namun juga berasal dari modal lain, seperti modal ekonomi, modal budaya, dan modal sosial. Masing-masing modal memiliki peran dan fungsinya sendiri dalam mendukung kemenangan calon dalam pilkada. Sedangkan habitus dan ranah memiliki peran bagaimana kandidat dapat bersikap di tengah ranah politik yang didalamnya terjadi pertarungan dalam rangka memperebutkan kekuasaan.

Sehingga, dengan penjabaran latar belakang tersebut penulis memutuskan untuk melakukan penelitian mengenai “Kemenangan Minoritas: Analisis Praktik Sosial Pierre Bourdieu terhadap Kemenangan Budhi Sarwono pada Pilkada Banjarnegara 2017”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, penulis merumuskan permasalahan yang akan dikaji lebih mendalam di dalam penelitian ini. Rumusan masalah yang dimaksud adalah :

1. Bagaimana relasi modal simbolik dengan strategi politik dalam kemenangan Budhi Sarwono pada pilkada Banjarnegara tahun 2017?
2. Bagaimana strategi politik Budhi Sarwono dalam praktik sosial Pierre Bourdieu?

1.3 Tujuan Penelitian

Pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk mendapat informasi yang akurat sesuai dengan permasalahan yang sudah dirumuskan, adapun tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Menganalisis mengenai relasi modal simbolik dengan praktik sosial dalam kemenangan Budhi Sarwono pada pilkada Banjarnegara tahun 2017.
2. Menganalisis strategi politik Budhi Sarwono dalam perspektif praktik sosial Pierre Bourdieu

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dalam studi Ilmu Pemerintahan. Khususnya dalam analisis strategi politik dan praktik sosial. Selain itu, penelitian ini juga menjadi contoh analisis relasi modal simbolik dengan strategi politik, serta analisis strategi politik dalam perspektif praktik sosial Pierre Bourdieu.

1.4.2 Kegunaan secara Praktis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan, masukan, dan menambah wawasan bagi para pembaca khususnya mahasiswa Ilmu Pemerintahan mengenai relasi modal simbolik dengan strategi politik dalam kontes pilkada. Serta melihat strategi politik kandidat dalam perspektif praktik sosial Pierre Bourdieu.

1.5 Tinjauan Literatur

1. *Glembuk*, Strategi Politik dalam Rekrutmen Elit Penguasa di Desa Pulungsari Yogyakarta, ditulis oleh Bambang Hidayana.
2. Penerapan Konsep Teori Permainan (*Game Theory*) dalam Strategi Kampanye Politik (Studi Kasus: Strategi Pemenangan Pemilu DKI Jakarta 2017), ditulis oleh Ahmad Saifuddin, Ni Ketut Tari Tastrawati, dan Kartika Sari.
3. Kampanye sebagai Komunikasi Politik: Esensi dan Strategi dalam Pemilu, ditulis oleh Siti Fatimah.

Penelitian ini mencoba mengkritisi ketiga penelitian di atas yang meletakkan modal politik sebagai modal utama yang digunakan dalam kampanye sebagai

bentuk strategi politik. Padahal pada praktiknya, strategi politik yang efektif dan efisien seharusnya menggabungkan akumulasi modal yang dimiliki oleh kandidat. Sehingga dalam hal ini, tidak hanya modal politik yang harus diperhatikan, terdapat modal-modal lain yang harusnya dijadikan kekuatan menyusun strategi politik. Pemanfaatan modal lain dalam menyusun strategi politik diperlukan untuk mengukur sejauh mana kekuatan dari akumulasi seluruh modal yang dapat dimanfaatkan untuk menarik suara konstituen. Karena pada pemilihan kepala daerah, peserta harus mempertimbangkan sejauh mana kekuatan lawan. Dalam hal ini, apabila strategi politik hanya berfokus pada modal politik maka apabila lawan memanfaatkan kepemilikan modal di luar modal politik akan berdampak pada strategi politik di lapangan.

Dalam penelitian ini, penulis mencoba mengambil kekurangan dari ketiga jurnal di atas yang menitikberatkan modal politik sebagai sorotan dalam menyusun strategi politik dengan menganalisis praktik sosial kemenangan Budhi Sarwono yang menggabungkan kepemilikan modal (modal sosial, modal politik, modal ekonomi) dalam konstruksi habitus masyarakat di Banjarnegara pada pemilihan kepala daerah Banjarnegara tahun 2017.

1.6 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.6.1 Strategi Kandidat dalam Pemilihan Kepala Daerah

Schroder dalam bukunya mengungkapkan bahwa strategi politik adalah usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan politis (Schroder, 2010: 27). Dalam

prosesnya, penyusunan strategi perlu dipertimbangkan dengan memerhatikan strategi lawan. Strategi yang dipilih harus memerhatikan profil, program, kinerja, serta kemampuan dari kandidat itu sendiri. Pada ranah politik, strategi dilakukan untuk memperoleh kekuasaan. Sehingga diperlukan strategi yang dapat mempengaruhi proses menuju kekuasaan. Dalam kontes pilkada, strategi politik yang dibuat harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat agar dapat mempengaruhi mereka untuk memberikan hak pilihnya.

Peran individu atau calon kepala daerah dalam sebuah penyusunan strategi diperlukan terutama dalam pengorganisasian. Sosok dari calon kepala daerah tersebut sedikit banyak akan membawahi struktur organisasi di bawahnya sehingga diperlukan kemampuan manajerial yang mumpuni (Schroder, 2010: 101). Meskipun terdapat kemungkinan ia tidak sepenuhnya turun tangan dalam proses strategi politik. Hal ini yang dilakukan oleh Budhi Sarwono berkaca dari pengalaman kekalahannya pada 2011 silam. Dalam menyusun strategi politiknya, ia menggunakan jasa dari lembaga survey serta konsultan.

Dalam prosesnya, strategi politik dalam sebuah proses pemilihan diturunkan dalam strategi kampanye. Strategi kampanye sendiri merupakan bentuk khusus dari strategi politik dimana aktor-aktor politik menyusun taktik untuk memperoleh kekuasaan melalui perolehan suara yang diberikan oleh konstituen (Schroder, 2010: 29). Kandidat dan jajaran timnya akan menyusun strategi terbaik agar dapat memperoleh nilai positif dari masyarakat sehingga mereka dengan percaya memberikan suaranya. Melalui proses wawancara dengan Budhi Sarwono, dapat dikatakan bahwa penggunaan jasa konsultan politik dalam pencalonannya pada

2017 lalu merupakan salah satu rencana taktis yang memang sudah dipikirkan dari jauh hari. Rencana taktis dapat dilakukan tidak hanya oleh pemimpin pada tahap perencanaan, melainkan dapat pula dilakukan oleh pihak ketiga dari kalangan intelektual (Schroder, 2010: 32). Dengan menerapkan sebuah rancangan taktis, maka pembagian aktor, taktik, proses, serta sasarannya akan lebih tepat sasaran.

Selain pembentukan strategi kampanye yang tepat, penilaian dari masyarakat juga menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan. Karena, penilaian yang bersifat dari mulut ke mulut lebih cepat tersebar dan terpatri di tengah masyarakat. Beberapa entitas yang perlu diperhatikan dalam proses penilaian oleh masyarakat diantaranya adalah tingkat popularitas, citra atau persona, serta dukungan internal (Schroder, 2010: 102-104). *Pertama* adalah tingkat popularitas, dimana tim pemenangan harus memperhatikan sejauh mana calonnya dikenal oleh masyarakat. Semakin tinggi tingkat popularitas kandidat, maka akan semakin mudah diterima oleh masyarakat atas apa yang disampaikan. Selain itu, tingginya tingkat popularitas juga berpengaruh pada proses persebaran informasi di tengah masyarakat. Hal ini pula yang menimpa Budhi Sarwono, meskipun ia bukan berasal dari kalangan politik namun kepopulerannya dapat mengalahkan tingkat popularitas Hadi Supeno yang merupakan wakil bupati petahana. Melalui proses wawancara yang dilakukan dengan koordinator lapangan tim kampanye BisSa, kampanye yang dilakukan mereka saat safari politik juga selalu ramai dikunjungi oleh masyarakat.

Kedua adalah citra atau persona. Setiap kandidat yang ingin maju dalam kontes pilkada memerlukan citra yang positif untuk ditunjukkan kepada masyarakat. Karena citra diperlukan masyarakat untuk mendapatkan gambaran mengenai

karakter calon pemimpin mereka, sehingga akan mempermudah proses penilaian. Dalam prosesnya, citra memiliki relasi yang cukup kuat dengan tingkat popularitas. Dimana tingginya tingkat popularitas dapat mempengaruhi citra yang terbentuk di tengah masyarakat. Sehingga, bagi kandidat yang memiliki tingkat popularitas tinggi dibutuhkan kebijaksanaan untuk bertindak di hadapan umum. Meskipun pada praktiknya, sebaik apapun tindakan yang dilakukan akan mendapat komentar atau penilaian negatif dari kelompok lawan. Hal ini dikarenakan citra merupakan entitas yang bersifat subyektif dan *segmented*. Pada kasus Budhi Sarwono, ia bahkan mendapat cibiran negatif dari kelompok lawan meskipun sudah melakukan upaya yang menurutnya baik bagi masyarakat.

Ketiga adalah adanya dukungan internal. Bentuk dukungan internal sendiri dapat berasal dari dukungan partai politik dan/atau dukungan organisasi yang diikuti oleh kandidat. Dukungan internal diperlukan oleh masyarakat untuk melihat sejauh mana kandidat yang ada mendapat kepercayaan serta dukungan penuh dari lingkungan sekitarnya. Selain itu, dukungan internal juga diperlukan untuk mengatasi cibiran negatif dari kelompok lawan. Dengan dukungan internal yang solid dan kompak, maka kandidat tetap bisa memperlihatkan citra bahwa ia tidak terpengaruh terhadap penilaian negatif dari lawan. Syarat dukungan internal ini menjadi salah satu yang paling diperhatikan oleh Budhi Sarwono. Berkaca pada kekalahannya pada 2011 silam yang menurutnya, salah satu penyebabnya adalah adanya *missink-link* dari dukungan internal. Hal ini dikarenakan ia maju dari jalur *independent*, sehingga tidak mendapat dukungan dari partai politik.

Namun pada akhirnya setiap entitas memiliki keterkaitan satu sama lain. Baik tingkat popularitas, citra, maupun dukungan internal ketiganya diperlukan untuk memperoleh penilaian yang positif dari masyarakat. Sehingga kepercayaan masyarakat untuk memberikan suaranya bersifat absolut. Dengan anggapan masyarakat bahwa kampanye merupakan proses yang tidak cukup penting dalam pilkada, tim penyusun harus tetap bekerja ekstra untuk memenangkan calonnya. Anggapan tersebut dilatarbelakangi karena adanya kampanye hitam serta politik uang yang sudah menjadi rahasia umum. Sehingga mayoritas masyarakat masih beranggapan bahwa kampanye adalah kegiatan bagi-bagi uang saja.

1.6.2 Praktik Sosial dalam Pemilihan Kepala Daerah

Pierre Bourdieu berpendapat bahwa agar dapat memahami mengenai susunan dan cara berfungsinya kehidupan sosial, diperlukan pembahasan mengenai modal secara umum, bukan hanya mempelajari modal dalam artian modal simbolik atau modal ekonomi (Bourdieu, 1986: 15-16). Bourdieu memisahkan antara modal simbolik, modal budaya, dan modal sosial dengan menggunakan indikator tingkat kemudahannya untuk ditransformasikan. Masing-masing dari modal tersebut memiliki tingkat kemudahan transformasi yang berbeda. Modal simbolik, menurut Bourdieu dapat ditransformasikan dalam bentuk pecahan uang dengan mudah, serta dapat diwujudkan dalam wujud hak kepemilikan. Walaupun dalam situasi tertentu, modal budaya juga dapat ditransformasikan ke dalam bentuk modal yang mempunyai sebuah nilai ekonomi, serta dapat diwujudkan sebagai tingkatan pendidikan. Hal tersebut juga berlaku bagi modal sosial yang dapat pula ditransformasikan menjadi modal yang mempunyai nilai ekonomi, bahkan dapat

dilihat dalam wujud gelar pendidikan yang diperoleh seseorang (sarjana). Masing-masing gelar sarjana sesuai dengan keahlian atau kemampuan seseorang, diyakini oleh Bourdieu akan memiliki nilai ekonomis yang berbeda meskipun gelar tersebut didapatkan dari perguruan tinggi yang sama. Dengan argumentasi tersebut, Bourdieu kemudian menjelaskan pengertian modal sosial sebagai segenap sumber daya, baik secara aktual ataupun secara potensial memiliki keterkaitan dengan perihal pemilikan jejaring dalam interaksi kelembagaan dengan dasar saling mengenal dan saling mengakui. Dengan menjadi bagian dari suatu organisasi atau kelompok, maka seseorang akan mendapatkan dorongan dari modal yang dimiliki secara ramai-ramai (kolektif). Bourdieu juga beranggapan bahwa besaran modal sosial yang ada pada anggota dari suatu organisasi atau kelompok bergantung pada tingkatan baik kualitas maupun kuantitas interaksi yang dibentuk, serta seberapa besar jumlah modal simbolik, modal budaya, dan modal sosial yang dimiliki oleh setiap anggota pada organisasi tersebut (Bourdieu, 1986: 249). Dalam (Hanifan, 1916: 130) modal sosial dijelaskan bukan sebagai modal biasa seperti modal simbolik (kekayaan), namun lebih pada arti perumpamaan, walaupun memang modal sosial menjadi modal utama dalam menjalankan kehidupan sosial atau kehidupan bermasyarakat.

Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan analisis strategi politik melalui perspektif teori praktik sosial dikemukakan oleh Pierre Bourdieu dalam bukunya *"The Logic of Practice"*. Teori Praktik yang dikemukakan Bourdieu berawal dari niatannya untuk menyatukan gelora antara objektivisme dan subjektivisme. Praktik sosial bagi Bourdieu memiliki arti sebagai buah dari pergerakan yang bersifat

dialog antara internalisasi eksterior dan eksternalisasi interior. Eksterior disini diartikan sebagai susunan objektif yang berada di luar tindakan yang dilakukan di lingkungan sosial. Sedangkan interior diartikan sebagai seluruh hal yang melekat pada diri makhluk sosial. Seluruh entitas yang diperhatikan dan dialami oleh pelaku sosial yang ada di luar dirinya (eksterior), akan melakukan pergerakan secara sistematis dan dinamis dengan menyisipkan ungkapan secara dialektis menjadi bagian dari entitas yang ada di dalam pelaku sosial (interior). Bourdieu juga berpendapat bahwa dunia sosial tidak dapat dijelaskan sekedar gugus dari perilaku makhluk sosial, atau hanya dianggap sebagai perilaku yang ditentukan oleh sistem. Dunia sosial bagi Bourdieu dianggap sebagai tempat melakukan segala hal yang berkaitan dengan sosial (praktik sosial) (Bourdieu, 1986 81-83).

Bourdieu mengemukakan rumus umum tentang praktik sosial yakni: **(Habitus x Modal) + Ranah = Praktik**. Habitus merupakan “struktur kognitif”, yakni dengan entitas tersebut makhluk sosial berinteraksi dengan dunia sosial (Ritzer & Goodman, 2012: 581). Habitus juga dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan baik secara sadar maupun tidak sadar oleh individu atau kelompok yang kemudian diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara alami dan berkembang dalam lingkungan sosial tertentu. Habitus disini berarti bahwa perbuatan yang dilakukan tidak selalu berdasar pada peraturan atau norma yang ada di masyarakat, namun kemudian karena dilakukan secara berkala dan berkesinambungan sehingga dianggap sebagai pola perbuatan yang alamiah. Habitus yang terbentuk juga dapat berasal dari perbuatan yang disadari dan/atau tidak disadari. Habitus yang terbentuk dari perbuatan seseorang dapat menjadi modal

kandidat dalam rangka pencalonan dirinya sehingga dapat mendulang perolehan suara pada pemilihan. Karena tanpa disadari, sebuah habitus positif yang terbentuk di tengah masyarakat dan disadari keberadaannya oleh masyarakat dapat dijadikan acuan atau nilai positif yang dimiliki oleh pemilik habitus tersebut. Hal tersebut pula yang terjadi pada Budhi Sarwono, habitus yang terbentuk dari berbagai perbuatan positif yang dilakukannya sedikit banyak memberikan pengaruh pada perolehan suara pada pilkada lalu.

Dalam menjalin interaksi tersebut, manusia terikat dengan hubungan dan dimensi sosial. Dalam pemenuhan indikator secara sosial, manusia diwajibkan memiliki modal (*capital*) yang digunakan untuk mengisi hubungan dan dimensi sosialnya dengan manusia lain. Tujuan utama seseorang mengikuti kontes pemilihan kepala daerah agar mendapatkan posisi kekuasaan tertinggi di daerahnya yang diperoleh melalui pemberian suara dari konstituen. Sehingga, habitus yang sesuai adalah habitus yang melekat pada masyarakat Banjarnegara. Habitus disini dimanifestasikan dalam bentuk konstruksi pola pikir atau cara pandang masyarakat Banjarnegara terhadap pemerintah daerah pada masa itu. Ketidakhadiran pemerintah daerah dalam beberapa aspek yang menurut masyarakat menimbulkan *distrust* dapat dijadikan habitus yang akan mempengaruhi strategi politik yang nantinya diterapkan oleh Budhi Sarwono. Konstruksi masyarakat tersebut dilihat sebagai salah satu potensi yang dapat dijadikan landasan dibentuknya strategi politik untuk memenangkan pilkada.

Bourdieu juga berpendapat bahwa habitus acap kali digunakan untuk menjelaskan norma sosial atau sikap seseorang yang disegmentasikan oleh norma

asal. Proses pembentukan habitus dilakukan secara terus menerus melalui aksi, pola pikir, dan pandangan terhadap lingkungannya yang akan menuntun individu tersebut dalam ranah atau arena pertarungan. Cara kerja habitus dapat mengarahkan individu untuk mengetahui, menilai, dan menghargai apa yang ada di lingkungan sosialnya karena akan dilihat sebagai panutan atau contoh bagi target politiknya.

Sebagai kerangka klasifikatif, habitus dinilai dapat membuahkan variasi *life style* yang bertolak belakang dan praktik-praktik dalam kegiatan sehari-hari individu. Kerangka kerja habitus didapat dari pengalaman individu saat mengalahkan lawan politiknya dalam pemilu melalui interaksi atau komunikasi yang dijalin dengan target politiknya. Pengalaman inilah yang kemudian dianggap sebagai sikap atau perilaku, serta pandangan yang melebur dengan diri individu tersebut sebagai buah dari pengalaman objektif ataupun subjektif yang pernah dilalui. Pengalaman yang diperoleh dari aktivitas pembentukan habitus dapat digolongkan sebagai produksi kultural dimana hal tersebut berasal dari individu yang beraktivitas dalam ranah politik dan sosialnya sendiri. Habitus menjadi cerminan masyarakat kandidat dalam hal berperilaku, berkomunikasi, dan bersikap dalam arena politik. Sehingga habitus yang akan diteliti oleh peneliti adalah bagaimana cara pandang masyarakat Banjarnegara terhadap pemerintah daerah pada saat pencalonan kepala daerah. Peneliti akan melihat bagaimana Budhi Sarwono menyilangkan modal yang dimilikinya dengan melakukan hal tertentu di ranah tertentu pula, yang bertujuan untuk menarik simpati target politik agar memilihnya di pilkada serentak 2017. Salah satu strategi yang terbentuk dari habitus yang cukup terkenal dilakukan beliau adalah dengan membangun jalan-

jalan rusak di Banjarnegara yang kemudian ditempel dengan gambar baliho atau pamflet bergambar dirinya. Proses pembentukan habitus dapat dipengaruhi oleh keluarga, kondisi lingkungan, pendidikan, serta pengalaman yang sudah dialami. Setiap arena tertentu memiliki kondisi nilai dan sikap yang bervariasi sehingga dalam proses pencalonan seorang kandidat kepala daerah akan menghasilkan habitus baru yang disesuaikan dengan habitus lama.

Habitus juga mempengaruhi terbentuknya ranah atau *field*, sedangkan ranah menjadi locus kerja habitus. Dalam (Susilo, Haryono, & Ganap, 2014: 90), habitus dijelaskan sebagai perbuatan dalam bersikap yang tidak disadari pada suatu ruang publik yang berada pada kerangka kekuasaan. Namun, tetap saja habitus memiliki tujuan tertentu yang dapat diperoleh melalui pemanfaatan pada ranah yang tepat.

Sementara itu ranah diartikan sebagai semacam tempat untuk berkompetisi yang didalamnya menyertakan modal (Ritzer & Goodman, 2012: 583). Sedangkan Bourdieu (dalam Fashri, 2014: 105-106) menjelaskan ranah sebagai arena pertarungan yang didalamnya terdapat usaha untuk memperjuangkan modal atau sumber daya, serta untuk meraih jalan pintas yang dekat dengan penguasa. Seperti modal simbolik, modal sosial, dan modal kultural untuk kemudian dimanfaatkan didalam persaingan. Ranah merupakan wilayah beradu kekuatan yang memiliki tujuan dalam rangka memperebutkan modal atau sumber daya, serta memperoleh akses atau jaringan mendekati penguasa. Ranah dalam konteks ini menjadi tempat perebutan modal yang disebut sebagai basis bagi para kandidat untuk melancarkan aksi politiknya melalui dialog atau negosiasi yang dilakukan oleh kandidat dan tim suksesnya. Proses perebutan ini yang kemudian mengarah pada tumpang tindih

kepentingan yang terjadi di arena politik. Terdapat beberapa ranah yang dijelaskan dalam deskripsi teori Bourdieu, diantaranya yakni ranah sastra, ranah kultural, ranah bisnis, ranah sosial, serta ranah politik. Ranah tersebut saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Dalam suatu waktu, ranah dapat menciptakan sebuah habitus, meskipun kemudian habitus tersebut merubah ranah sesuai dengan strukturnya.

Dalam penelitian ini, ranah dimaksudkan sebagai tempat bagi para kandidat calon kepala daerah untuk berjuang memperebutkan sumber-sumber modal atau sumberdaya untuk mencapai tujuannya yakni kekuasaan. Ranah yang akan dipilih oleh peneliti dalam penelitian ini antara lain yakni ranah politik, ranah sosial, serta ranah ekonomi. Ranah-ranah tersebut akan dimanfaatkan oleh kandidat dalam memaksimalkan habitus dan modalnya untuk menarik suara pemilih. Dalam ranah, modal memiliki posisi prioritas yang menentukan posisi seseorang dimana semakin besar modal yang dimiliki oleh kandidat maka secara otomatis semakin kuat posisi atau eksistensi kandidat tersebut. Dalam menyatukan hubungan yang terjalin antara ranah dan modal, maka pasangan bupati ini terjun ke dunia politik praktis untuk memperoleh sekaligus memanfaatkan modal yang sudah dimiliki.

Dengan mengacu pada persamaan praktik sosial yang dikemukakan oleh Bourdieu, maka apabila modal yang dimiliki semakin besar, akan semakin besar pula praktik yang dilakukan. Pemilihan kepala daerah sebagai manifestasi dari ranah politik memerlukan tiga modal utama, yakni: modal sosial, modal politik, serta modal ekonomi. Penelitian ini menekankan analisis strategi politik dengan memanfaatkan akumulasi dari modal sosial, modal politik, serta modal ekonomi.

Modal sosial dapat dilihat melalui tingkat pendidikan, pekerjaan, serta ketokohan seseorang dalam masyarakat. Bourdieu dalam *Forms of Capital* menjelaskan modal sosial sebagai kumpulan dari sumber daya aktual atau potensial dalam kepemilikan jaringan yang berlangsung secara terus menerus (Bourdieu, 1986: 21). Bentuk sumber daya tersebut dapat berupa perkenalan dan/atau pengakuan timbal balik yang memberikan dukungan kolektif terhadap anggotanya. Bourdieu menegaskan modal sosial dapat diperoleh melalui keanggotaan seseorang dalam sebuah institusi atau organisasi tertentu (Bourdieu, 1986: 22). Dalam praktiknya, bahkan beberapa organisasi memusatkan modal sosial untuk memperoleh kemudahan secara instan. Baik kemudahan akses, maupun kemudahan ekonomi.

Keberadaan jaringan dalam sebuah modal sosial tidak terjadi secara alamiah. Praktik-praktik negative dalam pemanfaatan modal sosial sering terjadi dalam institusi untuk memelihara hubungan kekerabatan satu dengan yang lainnya. Reproduksi modal sosial mengandalkan sosialisasi atau hubungan antar anggota secara terus menerus. Sehingga jaringan yang diciptakan akan memiliki kekuatan yang besar. Bahkan, Bourdieu mengandaikan hubungan jaringan yang *powerful* dapat mengabaikan keberadaan modal ekonomi. Hal ini disebabkan karena jaringan yang terbentuk akibat proses sosialisasi memiliki legitimasi yang lebih kuat (Bourdieu, 1986: 22-23). Nilai tersebut akan lebih kuat apabila seseorang memiliki modal sosial yang bersifat warisan dengan nama besar, mampu melanggengkan hubungan secara turun temurun dan menjaga potensi atau *privilege* yang ada di dalamnya. Orang-orang dengan kelebihan tersebut dapat memanfaatkan hubungan

tak langsung menjadi sebuah jaringan yang langgeng melalui jaringan yang sudah dimiliki sebelumnya.

Modal politik dalam sebuah kontes pilkada menjadi satu entitas yang keberadaannya tidak dapat diabaikan begitu saja. Modal politik seseorang dapat diperoleh melalui dukungan partai politik. Dalam pelaksanaannya, kandidat kepala daerah sudah pasti akan berusaha keras untuk mendapatkan dukungan dari partai politik agar mengusungnya menjadi calon kepala daerah. Selain itu, kandidat juga akan berusaha melakukan lobi serta negosiasi antar partai politik untuk membentuk koalisi. Dengan koalisi yang terdiri dari multi partai, maka dukungan yang digalang akan lebih luas. Kandidat kepala daerah biasanya akan menyasar partai politik yang memiliki kursi di DPRD untuk memenuhi *tressehold*. Dalam pilkada Banjarnegara, jumlah minimal dukungan di DPRD bagi calon kepala daerah yang berasal dari partai politik adalah 9 orang. Sehingga dalam hal ini, Budhi Sarwono dan Syamsudin memilih Partai Demokrat sebagai pengusung, sedangkan PPP serta Golkar untuk menjadai partai pendukung.

Modal politik dalam pilkada menjadi penting karena sebagian besar masyarakat masih memiliki afiliasi terhadap partai politik tertentu. Dalam hal ini, Budhi Sarwono belajar dari kekalahannya pada 2011 silam dimana ia maju menjadi calon kepala daerah melalui jalur *independent* atau tanpa partai politik. Karena tanpa disadari, partai politik memiliki peran yang tidak dapat dipandang sebelah mata untuk menjaga konstituen mereka. Bahkan sebagian besar partai politik memiliki susunan pengurus hingga tingkat desa. Sehingga penyebaran materi kampanye akan lebih mudah karena disampaikan oleh para pengurus partai di lingkup paling kecil.

Selain itu, adanya modal politik akan berpengaruh terhadap modal simbolik yang dimiliki oleh kandidat. Modal simbolik merupakan modal yang diperoleh oleh seseorang melalui kedudukan, jabatan, tingkat pendidikan, tingkat ekonomi, serta tolak ukur lain yang berkaitan dengan citra atau *prestige* seseorang. Modal simbolik dalam dinamika politik dapat berupa kehormatan, kepercayaan, serta kesukaan. Modal-modal tersebut diperoleh oleh actor politik melalui aktivitas politik yang diperbuatnya. Sehingga tidak jarang terdapat beberapa actor politik yang bercitra untuk mendapatkan predikat positif dari masyarakat.

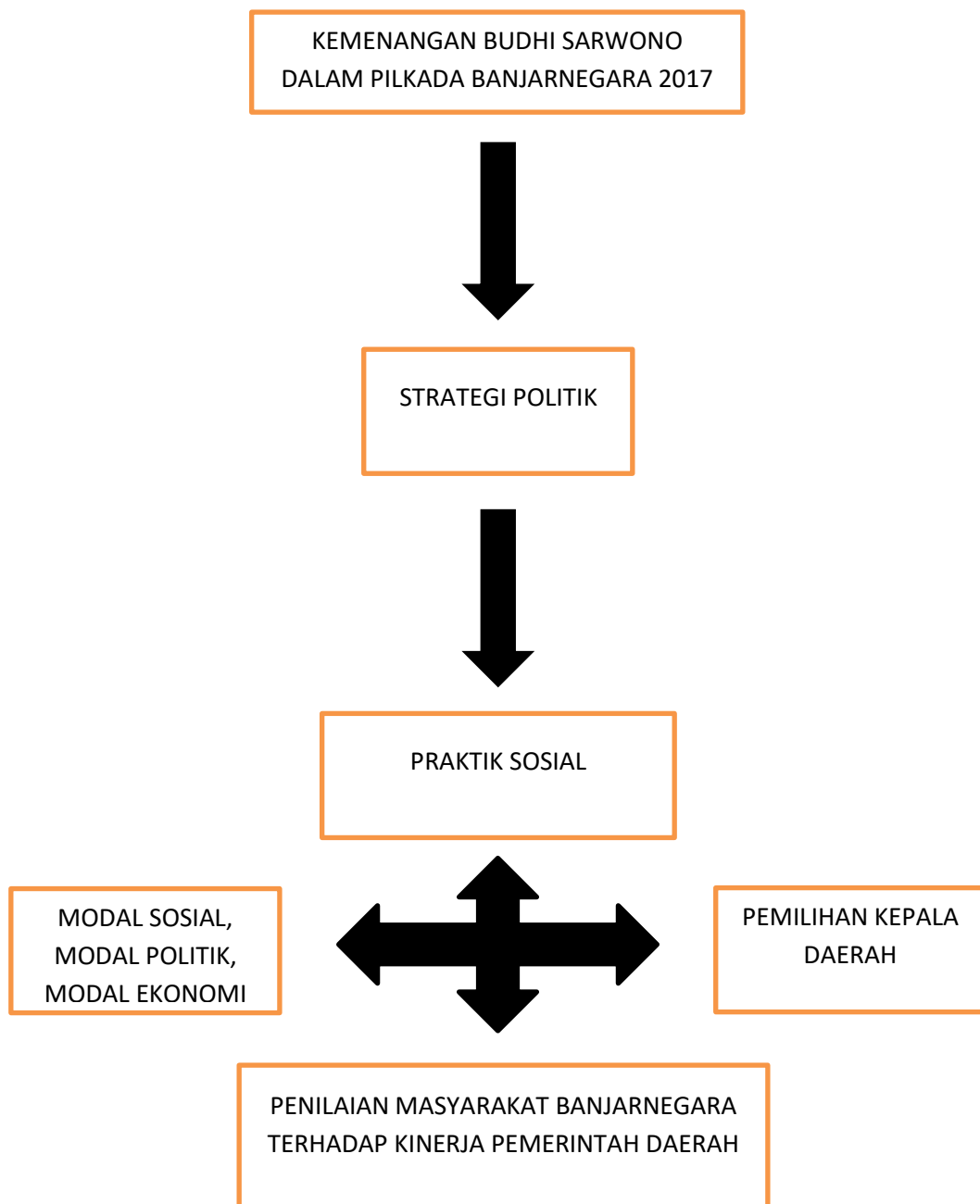
Sedangkan modal ekonomi memiliki peran sebagai mesin penggerak dari modal-modal lain. Modal ekonomi bahkan menjadi penggerak habitus dalam konteks politik. Contoh nyata dalam kampanye sebagai suatu habitus adalah perlunya modal ekonomi untuk memasang alat peraga kampanye (APK) bahkan untuk menggerakkan masa. Hal ini juga disadari oleh Budhi Sarwono bahwa keberadaan modal ekonomi menjadi entitas yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis, Budhi mengaku bahwa keberadaan modal ekonomi di masa sekarang menjadi sangat penting. Ia beranggapan bahwa segala sesuatu di dunia ini memang tidak ada yang gratis, apalagi suara dari konstituen.

Ketiga modal tersebut—sosial, politik, ekonomi—memiliki keterkaitan masing-masing yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Pemanfaatannya dalam habitus menjadikan formula yang mempermudah kemenangan Budhi Sarwono pada pilkada 2017 silam. Selain itu, proses perumusan strategi politik yang disusun dengan memperhatikan ketiga modal tersebut, habitus,

serta ranah yang dipilih juga memperbesar peluangnya untuk menduduki jabatan tertinggi di Banjarnegara hingga 2022 mendatang.

1.7 Operasionalisasi Konsep

1.7.1 Kerangka Konsep Pemikiran



Keterangan:

Strategi politik menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kemenangan kandidat dalam proses pemilihan kepala daerah. Strategi politik yang disusun harus memperhatikan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki baik oleh pasangan calon, baik dirinya sendiri maupun lawan. Salah satu cara menyusun strategi politik yang maksimal adalah dengan memperhatikan unsur dalam praktik sosial dimana terdapat modal, habitus, serta ranah yang dapat digunakan untuk mengukur kekuatan dan kelemahan kandidat. Modal yang digunakan dalam analisis penelitian ini terdiri dari modal sosial, modal politik, serta modal ekonomi. Sedangkan habitus sebagai sebuah konstruksi yang melekat pada individu dilihat dari bagaimana perspektif masyarakat Banjarnegara terhadap kinerja pemerintah daerah. Sinkronisasi antara modal dan habitus dapat dilakukan oleh kandidat sebagai strategi politik dalam pemilihan kepala daerah sebagai manifestasi dari ranah politik.

1.7.2 Operasionalisasi Konsep

Konsep	Definisi	Dimensi Konsep
Strategi Politik dalam Pilkada	Strategi yang digunakan oleh kandidat dalam memenangkan pemilihan kepala daerah.	- Strategi Politik Simpatik
Modal Sosial dalam Pilkada	Akumulasi sumber daya aktual atau potensial dalam kepemilikan jaringan	- Jaringan tim sukses; - Penilaian masyarakat terhadap sosok Budhi Sarwono.

	yang berlangsung secara terus menerus	
Modal Politik dalam Pilkada	Modal yang berasal dari dimensi politik, dan digunakan dalam tujuan politis.	- Kekuatan kursi/suara parpol pengusung
Modal Ekonomi dalam Pilkada	Akumulasi kepemilikan sumber daya yang memiliki nilai ekonomis.	- Politik uang; - Biaya tim sukses; - Biaya kampanye; - Biaya survey.
Praktik Sosial dalam Pilkada		

1.8 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai cara-cara untuk menjelajahi dan memahami arti yang disinyalir bermuara pada masalah yang terjadi dalam lingkup sosial (Creswell, 2016: 4)

1.8.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif dengan rancangan penelitian studi kasus (*case-study*), dimana menurut Creswell adalah suatu rencana susunan penelitian yang dapat dijumpai di berbagai kasus atau bidang, khususnya penilaian atau pertimbangan, dimana peneliti akan menjalankan kajian secara detail terhadap kasus yang memiliki *locus* atau batasan-batasan tertentu (waktu dan aktivitas) (Creswell, 2016: 19). Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan dan penyaringan data, serta menganalisis hubungan antara kategori informasi yang diperoleh dari informan.

1.8.2 Situs Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah.

1.8.3 Informan Penelitian

Informan yang diwawancarai dengan menggunakan metode purposive sampling terdiri dari Budhi Sarwono selaku calon terpilih, perwakilan dari partai pengusung (Partai Demokrat, PPP, Golkar). Sedangkan teknik penentuan informan menggunakan teknik sampling aksidental digunakan untuk mewawancarai pemilih pada Pilkada Banjarnegara 2017 silam. Metode sampling aksidental merujuk pada orang yang secara kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti bila dipandang cocok sebagai sumber data diambil sebagai sebagai sampel (Sugiono, 2009:85). Berdasar pada kriteria diatas, maka informan penelitian ini sebagai berikut:

Tabel
Informan Penelitian

Kategori Informan	Nama (alias)	Keterangan
Calon terpilih	Budhi Sarwono	Bupati Banjarnegara
Perwakilan Parpol	H. Endon Priyanto, ST, MM	Mantan Ketua DPC Demokrat Banjarnegara
	Drs. H. Indarto	Pengurus PPP (Sekretaris Tim Pemenangan)
	Djarkasi, S.Th. I	Pengurus P. Golkar (<i>Steering Committee</i> Tim Pemenangan)

Perwakilan Pemilih	Tari	Perempuan, 53 tahun Warga Desa Singamerta
	Puji Lestari	Perempuan. 28 tahun Warga Kelurahan Argasoka
	Suyadi	Laki-Laki, 43 tahun Warga Desa Bojanegara

1.8.4 Jenis Data

Peneliti menggunakan data berupa kata-kata, dan keterangan tertulis untuk menjelaskan mengenai data yang diperoleh dari informan saat dilakukan pengambilan data. Peneliti juga menggunakan data berupa materi audio dan visual kualitatif, serta dokumen-dokumen kualitatif (Creswell, 2016: 254-255)

1.8.5 Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan ialah:

1. Data Primer

Data primer merupakan data hasil penelitian yang diperoleh secara langsung oleh peneliti. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini hasil wawancara dengan informan

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari penelitian yang sudah ada sebelumnya (Hasan, 2002: 58). Data sekunder digunakan peneliti untuk mendukung temuannya yang berupa data primer. Bentuk-bentuk data sekunder dapat berupa: jurnal, buku, publikasi penelitian yang terdahulu, dan lain sebagainya.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Berikut adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti:

1. Wawancara

Wawancara merupakan cara pengambilan data dengan cara memberikan pertanyaan kepada responden, dan jawaban yang diperoleh disini akan ditulis sebagai catatan, atau rekaman (Hasan, 2002: 85). Peneliti melakukan wawancara dengan informan

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dalam penelitian digunakan untuk mendukung data yang diperoleh dari proses wawancara. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui pencarian informasi yang ada pada dokumen tertulis maupun dokumen elektronik, foto dan gambar yang diperoleh. Menurut Sugiyono (Sugiono, 2005: 83) data yang diperoleh juga akan lebih berkualitas apabila didukung dengan temuan foto, gambar, atau bahkan karya seni yang sudah eksis. Peneliti melakukan proses dokumentasi yang diperoleh melalui laman resmi KPU yang menampilkan informasi khusus pemilihan kepala daerah tahun 2017.

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data menurut Bogdan dan Biklen (Moleong, 2012: 248) diartikan sebagai usaha yang dilakukan untuk mengolah data dengan cara bekerja menggunakan data, mengelompokkannya, memilih untuk kemudian dijadikan satuan yang mudah dianalisis, mencari tatanan atau pola, mencari dan memilah temuan penting, serta memutuskan temuan yang dapat dipublikasikan kepada khalayak. Dalam penelitian ini, dilakukan beberapa tahapan dalam analisis data, yakni:

1. *Data Reduction* (Reduksi data)

Reduksi data diartikan sebagai suatu proses pemilahan, penyederhanaan, proses penarikan kesimpulan, dan konversi dari data primer. Reduksi data dalam penelitian kualitatif memiliki sifat ketersinambungan yang berarti dilakukan terus menerus selama proses penelitian. Langkah reduksi data yakni:

- a. Proses kategorisasi data (*Coding*), yakni usaha memilih setiap data yang diperoleh di lapangan sesuai dengan kriteria atau indikator kesamaan. (Moleong, 2011: 288)
- b. Penjabaran data, yakni proses mencari penjabaran atau pengertian dari data yang telah dianalisis dalam arti yang lebih luas. Dalam proses ini, data akan dicari secara rinci dan (Hasan, 2002: 137). Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pemilahan data yang diperoleh pada saat penelitian mengenai pandangan informan terhadap topik penelitian.

2. *Data Display* (Penyajian data)

Pada proses ini peneliti akan memperluas penjelasan informasi yang sudah tersusun untuk kemudian ditarik abstrak atau kesimpulan. Penyajian data yang umum digunakan pada penelitian kualitatif adalah penyajian data berupa narasi. Peneliti menjelaskan secara rinci informasi yang telah dikelompokkan sebelumnya mengenai pandangan informan yang kemudian akan ditarik kesimpulan yang ditulis dalam bentuk teks yang bersifat narasi.

3. *Conclusion* (Penarikan abstrak atau kesimpulan)

Peneliti membuat kesimpulan yang bersifat general. Dikarenakan penelitian ini dilakukan dengan desain penelitian studi kasus, maka kesimpulan dalam desain ini bersifat umum, namun berasal dari lingkup penelitian yang dibatasi oleh *locus* penelitian.

1.8.8 Kualitas Data

Validitas dan reliabilitas diperlukan untuk menunjang keabsahan data. Kedua poin di atas berfokus pada ketepatan metode serta kualitas data yang digunakan untuk melaksanakan proyek penelitian. Dalam ilmu sosial, pendekatan filosofis dan metodologis sangat dibutuhkan dalam menguatkan kualitas data dari penelitian yang diambil.

Untuk memperoleh hasil yang berkualitas peneliti menggunakan serangkaian proses validitas data. Validitas merupakan kesesuaian data yang diperoleh peneliti dari narasumber atau informan dengan fakta yang terjadi di lapangan atau objek penelitian (Sugiyono, 2010: 117). Maka dari itu, data dinyatakan valid apabila data yang telah didapatkan oleh peneliti tidak berbeda

dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Pada penelitian ini uji validitas yang digunakan peneliti adalah triangulasi.

Teknik yang digunakan untuk menguji keabsahan data adalah teknik triangulasi data. Triangulasi data adalah kegiatan yang dilakukan oleh peneliti setelah dia mendapatkan data dari informan, kemudian dilakukan pengecekan kembali dengan membandingkan dari sumber lain seperti lembaga/instansi atau pihak yang diakui dalam terjadinya proses tersebut. Cara yang dilakukan yaitu antara lain sebagai berikut :

- 1) Melakukan wawancara mendalam terhadap informan.
- 2) Melakukan uji silang antara informasi yang diperoleh dari informan dengan hasil informasi di lapangan.
- 3) Melakukan konfirmasi hasil yang diperoleh kepada informan lain atau sumber-sumber lain.